



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II

BPPP AMBON

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II

Tahun 2025 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai salah satu Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai media informasi, pertanggungjawaban kinerja serta sebagai alat pengendali menuju terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Laporan kinerja triwulan II Tahun 2025 ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada Tahun 2024. Perjanjian kinerja tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020-2024 dan perwujudan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran.

Selama triwulan II Tahun 2025, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagaimana tertuang dalam dua dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang terdiri perjanjian kinerja dengan Pusat Pelatihan KP terdiri dari 3 sasaran kegiatan dan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) serta perjanjian kinerja dengan Pusat Penyuluhan KP terdiri dari 3 sasaran kegiatan dan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai target dan realisasi kinerja pada triwulan II Tahun 2025, keberhasilan/kegagalan program, permasalahan dan solusi serta kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Akhir kata, semoga penyajian Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dan sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi pada triwulan II tahun 2025 dan umpan balik untuk terus meningkatkan kinerja kedepan secara produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, koordinasi pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi.

Ambon, 16 Juli 2025

**Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon**



Abubakar

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab:

Abubakar S.St.Pi, M.Si

Ketua:

Rahmawati Umasugi S.Pi, M.Si

Sekretaris :

Moh. Arief Hidayat A.Md, S.Pi

Anggota:

Fiona A.B. Nikyuluw S.Pi, M.Si

Dessy Rompis S.AP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
IKTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	6
1.3 Tugas dan Fungsi BPPP Ambon.....	6
1.4 Keragaan SDM BPPP Ambon	9
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis	16
2.2 Rencana Kerja Tahun 2024.....	23
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
2.4 Pengukuran Kinerja.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
3.1 Prestasi Kinerja	28
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	29
3.3 Akuntabilitas Keuangan	75
3.4 Efisiensi Anggaran.....	77
BAB IV PENUTUP	79
4.1 Capaian Kinerja Utama.....	79
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi.....	81
LAMPIRAN	

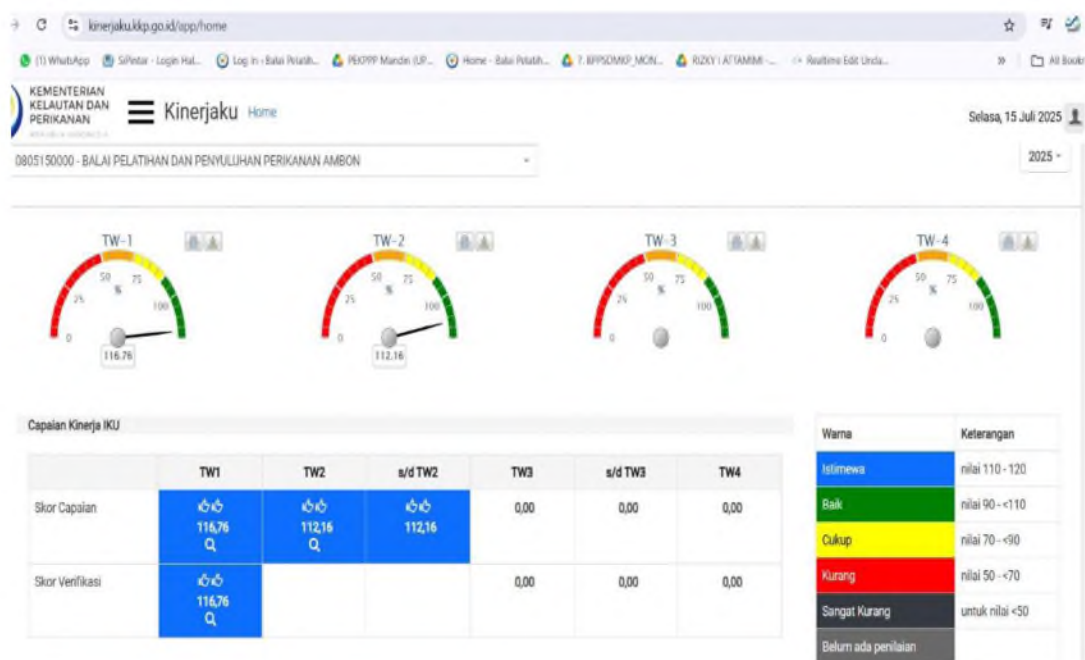
IKTISAR EKSEKUTIF

Sasaran kinerja yang dicapai pada triwulan II tahun 2025 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon yaitu administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, pengelolaan kerjasama, informasi dan dokumentasi ilmiah yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkup Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Berdasarkan perjanjian kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dengan Pusat Pelatihan KP yang terdiri dari 3 sasaran kegiatan dan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) serta perjanjian kinerja dengan Pusat Penyuluhan KP yang terdiri dari 3 sasaran kegiatan dan 6 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari Sasaran Strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 19 (Sembilan Belas) indikator kinerja, yang selanjutnya ditetapkan dalam dua dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan merupakan target kinerja Balai yang harus diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2025.

Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon triwulan II tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja

dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis logical framework dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Ambon triwulan II tahun 2025 sebesar 112,16%.



Dashboard Kinerja BPPP Ambon

Selama Triwulan II tahun 2025, dari 12 IKU yang menjadi target Triwulan II tahun 2025 BPPP Ambon, telah terealisasi sesuai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja BPPP Ambon triwulan II Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 2	REALISASI TW 2	% REALISASI
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Lulusan pelatihan yang tereserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Ambon (Orang)	30	40	120
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	60	69	120
		3	Nilai PNBSP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,4	0,53	120
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	0	0	-
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	5	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	0	0	-
3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Disuluh Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	1000	1100	110
		7	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	6	6	100
		8	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	18	40	120
		9	Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi Yang Mendapatkan Pendampingan oleh Satminkal BPPP Ambon (Unit)	5	6	120
4	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	10	Media Penyuluhan Sesuai Dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Ambon	0	0	-
5	Terselenggaranya tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	11	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan Yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Ambon (Orang)	0	0	-

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 2	REALISASI TW 2	% REALISASI
5	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	12	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	50	51,67	103,34
		13	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (Indeks)	70	80,89	115,56
		14	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	85	85	100
		15	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)	0	0	-
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Ambon (%)	80	0	0
		17	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon (%)	80	100	120
		18	Nilai IKPA BPPP Ambon (Nilai)	94	99,84	118,86
		19	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	0	0	-

Sumber tabel : Aplikasi Kinerjaku KKP

Secara umum kinerja BPPP Ambon sangat baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap IKU dengan Target Kinerja Tahunan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BPPP Ambon. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPP Ambon. Akhirnya, BPPP Ambon berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam masa transisi, menjadi langkah awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 59 Tahun 2024. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

RKP Tahun 2025 dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan dan/atau Kemiskinan Ekstrem. Delapan (8) Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian sasaran dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 terdiri atas: (1) memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian Bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Perkembangan IPTEK yang pesat di era revolusi industri 4.0 dan era sosial (society) 5.0 menuntut adanya perubahan tatanan kehidupan baru yang berpusat pada manusia (human-centered) serta berbasis teknologi (technology based). Cyber-physical system (CPS) dalam Industri 4.0 merupakan integrasi antara physical system, komputasi dan juga network / komunikasi, sedangkan society 5.0 merupakan penyempurnaan dari CPS menjadi cyber- physical-human systems. Pada era society 5.0 manusia tidak hanya dijadikan obyek (passive element), tetapi berperan aktif sebagai subyek (active player) yang bekerja bersama physical system dalam mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut, interaksi antara mesin (physical system) dan manusia diperlukan untuk menjaga keseimbangan maupun keharmonisan.

Hal utama yang harus dicermati adalah bahwa keberhasilan pembangunan perikanan sangat tergantung pada perubahan perilaku pelaku utama dalam

menyikapi tantangan tersebut. Selain peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, penyuluhan perikanan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan perikanan, karena mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan proses alih informasi dan teknologi (transfer knowledge) bagi pelaku utama beserta keluarganya serta anggota masyarakat lainnya. Terlebih lagi, pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Y Sub Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dimana penyelenggaraan penyuluhan perikanan menjadi kewenangan pusat, sehingga BPPSDM melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sebagai unit satuan kerja harus mampu memainkan peran strategisnya agar penyelenggaraan penyuluhan perikanan dapat berjalan efektif, efisien dan kompeten.

Keberadaan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi dan misi KKP melalui:

- a. Peningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan secara optimal melalui pelatihan dan sertifikasi;
- b. Mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar dan peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- c. Membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha melalui penumbuhan dan pembentukan usaha mikro, kecil dan koperasi sektor kelautan dan perikanan; serta

- d. Meningkatkan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan secara efektif dan efisien dan tepat sasaran melalui diseminasi dan pelatihan.

Untuk memastikan keseluruhan program dan kegiatan pembangunan KP tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan sasarannya, telah disepakati perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Menteri dengan Eselon I dan diturunkan secara berjenjang sampai tingkat individu pegawai, dan telah ditetapkan sampai tingkat daerah (satuan kerja).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam pencapaian visi dan misi organisasi.

Salah satu prinsip dalam tata cara kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah akuntabilitas, dimana akuntabilitas adalah sebagai salah satu wujud komitmen Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran dan pengendalian sumberdaya dalam penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan pada akhir periode pengukuran. Penyelenggaraan kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan Negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan

produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu Instansi Pemerintah atas pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai APBN/ APBD. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan Good Governance di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada tahun 2025 melaksanakan program kerja dan anggaran Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PUSLAT KP dan PUSLUH KP. Proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan berdasarkan program-program jangka panjang dan menengah KKP khususnya program pelatihan dan penyuluhan KP sebagaimana tertuang dalam Renstra PUSLAT KP dan PUSLUH KP tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP dan kewenangan dalam menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang disertai dengan pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan kinerja ini adalah memberikan gambaran kondisi objektif atau profil Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon untuk tahun 2025, perencanaan strategis, target dan capaian kinerja serta evaluasi capaian kinerja berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Utama dan/atau Penetapan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

1.2 Tujuan

Penyusunan Penyusunan laporan Kinerja (LKj) BPPP Ambon Triwulan I Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, dan memenuhi beberapa tujuan, yaitu:

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan dan Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan selaku Pemberi Mandat atas pencapaian Kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon selama Tahun Triwulan II tahun 2025.
- b. Sebagai umpan balik dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

1.3 Tugas dan Fungsi BPPP Ambon

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pelatihan dan penyuluhan yang ada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPP Ambon dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

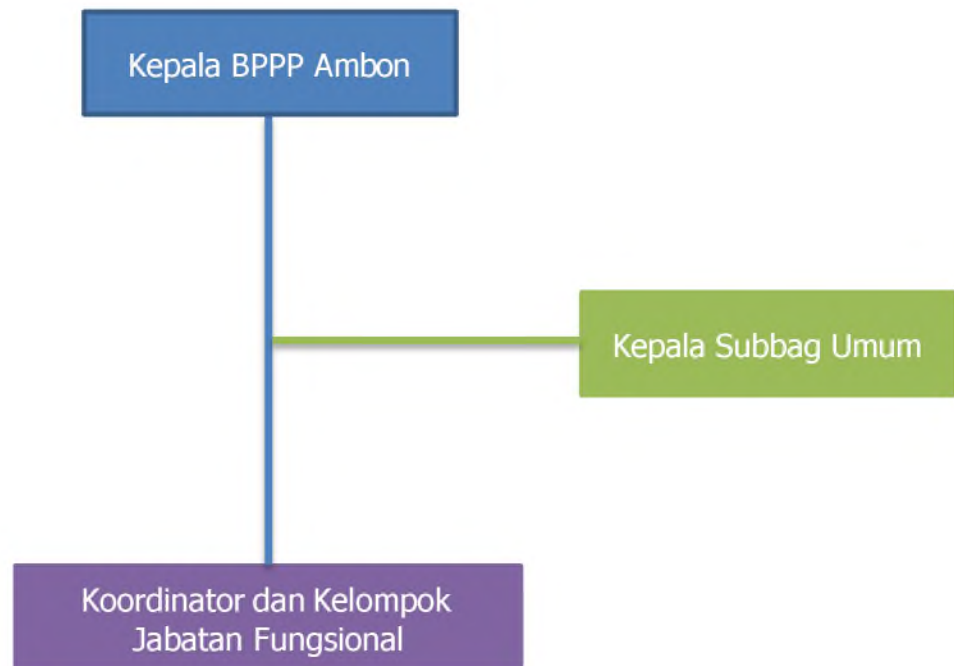
- a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan dibidang pelatihan dan penyuluhan perikanan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan;
- c. Pelatihan teknis dan manajerial dibidang perikanan;

- d. Penyusunan materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;
- e. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial dibidang perikanan;
- f. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;
- g. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta; dan
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, BPPP Ambon membentuk Struktur Organisasi dan didukung dengan kemampuan sumberdaya manusia perikanan dan sarana prasarana atau fasilitas yang tersedia. Masing-masing bagian mempunyai tugas pokok dan uraian tugas tersendiri. Sub Bagian Umum dengan tugasnya melakukan penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan perikanan. Kelompok jabatan fungsional dengan tugasnya memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon.

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/KEPMEN- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon, Struktur Organisasi di BPPP Ambon dapat dilihat pada Gambar:



Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Ambon

1.4 Keragaan SDM BPPP Ambon

Jumlah pegawai di BPPP Ambon per 31 Juni 2025 sebanyak 391 orang dengan rincian komposisi pegawai sebagai berikut :

Tabel 1. Komposisi Pegawai BPPP Ambon

NO	BAGIAN	JUMLAH
1	Kepala Balai / Eselon III	1 Orang
2	Subbag Umum	0 Orang
	Jabatan Fungsional Umum	20 Orang
	Tenaga Kontrak	27 Orang
3	Jabatan Fungsional Tertentu	
	- Widyaiswara	2 Orang
	- Instruktur	14 Orang
	- Penyuluh	235 Orang
4	Jabatan Fungsional Lainnya	
	- Analis Perencana	1 Orang
	- Analis Kepegawaian	1 Orang
	- Pranata Keuangan APBN	1 Orang
	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja	17 Orang
5	Penyuluh Perikanan Bantu	70 Orang
	Jumlah Total	391 Orang

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja (LKj) BPPP Ambon Triwulan II Tahun 2025:

- a. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. PP Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan KKP

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara lebih rinci, muatan dokumen LKj ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut :

- a. Ikhtisar Eksekutif, menyajikan ringkasan isi laporan kinerja;
- b. Bab I – Pendahuluan, Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi;
- c. Bab II – Perencanaan Kinerja, Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian

kinerja tahun 2025.

- d. Bab III –Akuntabilitas Kinerja, Capaian Kinerja Organisasi, Menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

- e. Bab IV – Penutup, Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- f. Lampiran, Perjanjian kinerja,
Lampiran yang dianggap perlu.

1.6 Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dibidang kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan kelautan dan perikanan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta riset kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon bertugas melaksanakan kegiatan Pelatihan Kelautan dan Perikanan pada wilayah kerjanya di 9 (sembilan) Provinsi di Indonesia. Wilayah kerja BPPP Ambon yaitu Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Papua

Barat Daya, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan. Kegiatan Pelatihan ditujukan kepada masyarakat kelautan dan perikanan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha di sektor penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.



Gambar 2. Wilayah Kerja BPPP Ambon

BPPP Ambon juga membawahi Penyuluh Perikanan pada 8 (delapan) Provinsi meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan. BPPP Ambon bertugas menyiapkan bahan pengembangan penyuluhan dan pelaksanaan penyuluhan, serta penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta.



Gambar 3. Wilayah Satminkal Penyuluhan BPPP Ambon

Keberhasilan pencapaian target ditentukan oleh sumberdaya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Berikut adalah potensi sumberdaya BPPP Ambon dalam mencapai tujuan organisasi :

- 1) BPPP Ambon berada pada posisi yang sangat strategis di Kota Ambon, tepatnya di Jl. Martha Alfons, Poka, Kecamatan Teluk Ambon. Sebelah selatan berbatasan dengan Pantai Teluk Ambon, sebelah Utara berbatasan dengan Universitas Pattimura, sebelah barat dicapai dengan jalur darat melalui Wayame dan Rumah Tiga, Sebelah Timur dicapai dengan kapal feri penyebarangan Galala-Poka
- 2) Memiliki workshop yang lengkap untuk setiap bidang pelatihan;
- 3) BPPP Ambon memiliki instalasi budidaya ikan air tawar yang strategis untuk pengembangan budidaya ikan air tawar;
- 4) Memiliki SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidangnya (2 orang widyaiswara, 14 orang instruktur, 3 orang tenaga teknis/pelatih, 235 orang penyuluh perikanan PNS dan 17 orang PPPK Penyuluh

Perikanan serta 70 orang penyuluh perikanan bantu);

- 5) Sebagian besar SDM BPPP Ambon memiliki usia muda yang produktif;
- 6) BPPP Ambon tersertifikasi ISO 9001:2015;
- 7) Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan diklat sesuai manajemen mutu ;
- 8) Memiliki akreditasi dari Direktorat Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan untuk menyelenggarakan diklat Basic Safety Training (BST);
- 9) Memiliki akreditasi program pelatihan budidaya ikan hias nemo dan pembesaran ikan kerapu pada KJA dari Lembaga Akreditasi (LA) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
- 10) Adanya mandat dari Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan kepada BPPP Ambon sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK);
- 11) BPPP Ambon sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi 1 sehingga dapat menerbitkan sertifikat kompetensi sendiri;
- 12) SDM Asesor BPPP Ambon sebanyak 20 orang sehingga akan mampu melaksanakan uji kompetensi dengan jumlah peserta yang banyak;
- 13) BPPP Ambon mampu membuat sarana produksi perikanan tertentu;
- 14) BPPP Ambon mampu menghasilkan produk hasil perikanan yang layak dipasarkan.

b. Permasalahan

Sebagai Lembaga pelatihan dan penyuluhan yang terus berkembang menjadi pilihan utama stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, BPPP Ambon memiliki beberapa hal yang penting untuk diperbaiki antara lain :

1) Aspek penyelenggaraan pelatihan KP :

- Ketersediaan tenaga pelatih (Instruktur dan Widyaiswara) yang terus berkurang dikarenakan beberapa orang sudah memasuki usia purnatugas dan mutasi;
- Sarana dan prasarana pelatihan belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang ditetapkan dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini;
- Kegiatan pelatihan yang dilakukan beberapa tahun terakhir, berdasarkan program prioritas KKP namun pada kenyataan dilapangan terdapat beberapa lokasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;

2) Aspek penyelenggaraan penyuluhan KP:

- Kualitas dan kuantitas penyebaran penyuluh perikanan masih belum merata disetiap kabupaten/kota;
- Sarana dan prasarana penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberikan arah bagi pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ini dituangkan dalam perencanaan strategis periode lima tahunan. Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kegiatan yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis baik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun maupun 5 (lima) tahunan. Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam dokumen perencanaan kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan termasuk dukungan pembiayaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan. Rencana kerja juga memuat target dan indikator sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Rencana strategis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2020-2024 berisi langkah-langkah strategis yang akan memberi arah bagi penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan penyuluhan dalam rangka menunjang visi Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan

dan Perikanan yang Berkelanjutan.

Sesuai dengan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dan untuk mencapai visi yang tertuang dalam RENSTRA, maka BPPP Ambon telah menetapkan Visi, Misi, Tugas dan Fungsi yaitu :

a. Visi

Visi didasarkan pada visi Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil dan makmur. Visi Presiden 2020-2024 adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong". Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan menggunakan visi Presiden.

Visi BPPSDM pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Visi Puslatluh KP pada tahun 2020-2024 adalah mendukung visi KKP dan visi BPPSDM yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

Sejalan dengan Pusat pelatihan dan Penyuluhan KP, visi BPPP Ambon pada tahun 2020-2024 adalah menggunakan Visi BPPSDM, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan Indonesia

maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.

b. Misi

Untuk dapat berkontribusi dalam pencapaian visi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka BPPP Ambon menerapkan misi yang sama dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP yang menjalankan misi Presiden, KKP dan BPPSDM dalam bidang kelautan dan perikanan sebagai berikut:

- 1) Misi ke-1 yakni Peningkatan Kualitas SDM KP melalui Peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset Kelautan dan Perikanan;
- 2) Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui pelatihan dan penyuluhan KP guna mendukung peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
- 3) Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui pelatihan dan penyuluhan KP guna mendukung Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang lestari;
- 4) Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

c. Tujuan

Tujuan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi KKP yang juga berdasarkan tujuan BPPPSDM KP dan Puslatluh KP yang ingin dicapai selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
- 2) Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.
- 3) Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
- 4) Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

d. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan 2025-2029 merupakan penjabaran Visi dan Misi pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang tersusun ke dalam 6 (Enam) Sasaran Kegiatan yakni :

1. Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan
2. Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
4. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
5. Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
6. Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

BPPP Ambon memiliki 6 (enam) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan beserta target yang akan dicapai Tahun 2025 yang juga mendukung program kinerja Pusat Pelatihan KP dan Pusat Penyuluhan KP, Adapun penjabaran program kerja BPPP Ambon dibagi menjadi 2 dalam mendukung program kinerja Pusat Pelatihan KP dan Pusat Penyuluhan KP yaitu :

Dukungan Program Kerja Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Sasaran Kegiatan pertama (SK-1) yang akan dicapai adalah " Terselenggaranya Pelatihan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan ", dengan Indikator Kinerja :

1. Jumlah lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Ambon (orang) dengan target Tahun 2025 sebesar 1.294 orang
2. Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih BPPP Ambon (orang) dengan target Tahun 2025 sebesar 1.840 orang

3. Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar) dengan target Tahun 2025 sebesar 0.81 rupiah miliar
4. Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (orang) target tahun 2025 sebanyak 30 orang

Sasaran Kegiatan kedua (SK-2) yang akan dicapai adalah Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan dan penyuluhan KP, dengan indikator kinerja :

1. Sarana Pelatihan KP yang meningkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (unit) target tahun 2025 sebanyak 1 unit.

Sasaran Strategi Ke-enam (SK-6) yang akan dicapai adalah terpenuhinya layanan dukungan manajemen BPPP Ambon dengan indikator kinerja berikut:

1. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%) dengan target Tahun 2025 sebesar 100 %
2. Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks) dengan target Tahun 2025 sebesar 83 %
3. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%) dengan target tahun 2025 sebesar 85%
4. Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (nilai) dengan target Tahun 2025 sebesar 80
5. Persentase tingkat kepatuhan pengelolaan BMN (%) BPPP Ambon Tahun 2025 sebesar 80 %
6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ (%) BPPP Ambon yang diumumkan pada STRUP Tahun 2025 sebesar 80 %

7. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (nilai) dengan target Tahun 2025 sebesar 92
8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (nilai) dengan target Tahun 2025 sebesar 71,5

Dukungan Program Kerja Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Sasaran Kegiatan ke-tiga (SK-3) yang akan dicapai adalah tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, dengan indikator kinerja :

1. Kelompok pelaku utama/Pelaku Pendukung (kelompok) yang disuluh di BPPP Ambon Tahun 2025 sebanyak 2.939 kelompok
2. Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Pendukung yang ditingkatkan kelasnya oleh BPPP Ambon (Kelompok) Tahun 2025 sebanyak 70 kelompok
3. Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Pendukung yang dibentuk oleh BPPP Ambon (kelompok) Tahun 2025 sebanyak 291 kelompok
4. Gabungan kelompok/koperasi/korporasi yang mendapatkan pendampingan oleh Satminkal BPPP Ambon (unit) Tahun 2025 sebanyak 46 unit

Sasaran Strategi Ke-dua (SK-4) Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja berikut:

1. Jumlah Media Penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di Satker BPPP Ambon Tahun 2025 sebanyak 1

Sasaran Strategi Ke-tiga (SK-5) yang akan dicapai adalah Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan indikator kinerja berikut:

1. Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis (orang) di BPPP Ambon Tahun 2025 sebanyak 7 orang

2.2 Rencana Kerja Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pada Rencana Strategis, maka BPPP Ambon didukung dengan anggaran sebesar Rp 52.988.789.000. Dukungan anggaran tersebut berupa kegiatan :

Tabel 2. Rencana Kerja Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	PAGU
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Ambon (Orang)	13.200.000
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	2.030.057.000
		3	Nilai PNBSP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	465.384.000
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	18.000.000
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	5	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	70.000.000

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	PAGU
3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Disuluh Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	592.738.000
		7	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	592.738.000
		8	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	592.739.000
		9	Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi Yang Mendapatkan Pendampingan oleh Satminkal BPPP Ambon (Unit)	111.793.000
4	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	10	Media Penyuluhan Sesuai Dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Ambon	3.802.932.000
4	Terselenggaranya tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	11	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan Yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Ambon (Orang)	31.858.899.000
6	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	12	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	6.200.000.000
		13	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	6.493.509.000
		14	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	70.000.000
		15	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)	16.800.000
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Ambon (%)	10.000.000
		17	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon (%)	10.000.000
		18	Nilai IKPA BPPP Ambon (Nilai)	20.000.000
		19	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	20.000.000

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PANRB Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang diimplementasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah memiliki tujuan :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelesaikan manajemen kinerja secara baik,
- b. Untuk mengontrol serta mengevaluasi tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan kinerja didalam laporan kinerja ini sudah didasarkan pada analisis logical framework. Penetapan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon tahun 2025 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan pada Januari 2025. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025.

Tabel 3. Penggabungan Perjanjian Kinerja antara Pusat Pelatihan KP dan Pusat Penyuluhan KP tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET TW 2	REALISASI TW 2
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Ambon (Orang)	1.294	30	40
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	1.840	60	69
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,81	0,4	0,53
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	30	0	0
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	5	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	1	0	0

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	TARGET TW 2	REALISASI TW 2
----	------------------	----	-------------------	----------------	-------------	----------------

3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Disuluh Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	2.939	1000	1100
		7	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	70	6	6
		8	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	291	18	40
		9	Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi Yang Mendapatkan Pendampingan oleh Satminkal BPPP Ambon (Unit)	46	5	6
4	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	10	Media Penyuluhan Sesuai Dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Ambon	1	0	0
		11	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan Yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Ambon (Orang)	7	0	0
5	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	12	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100	50	51,67
		13	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	83	70	80,89
		14	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP (%)	85	85	85
		15	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)	80	0	0
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Ambon (%)	80	80	100
		17	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon (%)	80	100	120
		18	Nilai IKPA BPPP Ambon (Nilai)	92	84	99,84
		19	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	71,5	0	0

Keterangan :

	IKU dengan Pusat Pelatihan KP
	IKU dengan Pusat Penyuluhan KP

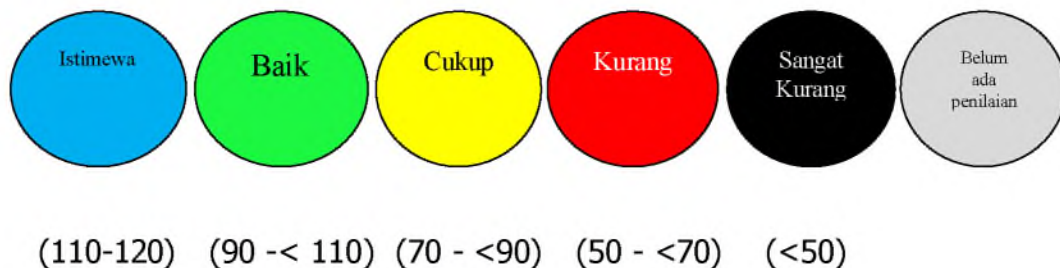
2.4 Pengukuran Kinerja

2.4.01 Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon Triwulan II Tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- Angka maksimum adalah 120;
- Angka minimum adalah 0;
- Formulasi penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda.

Adapun status indeks capaian IKU seperti gambar sebagai berikut :



Gambar 4. Status indeks capaian IKU

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen logical framework.

2.4.02 Metode Pengukuran Kinerja

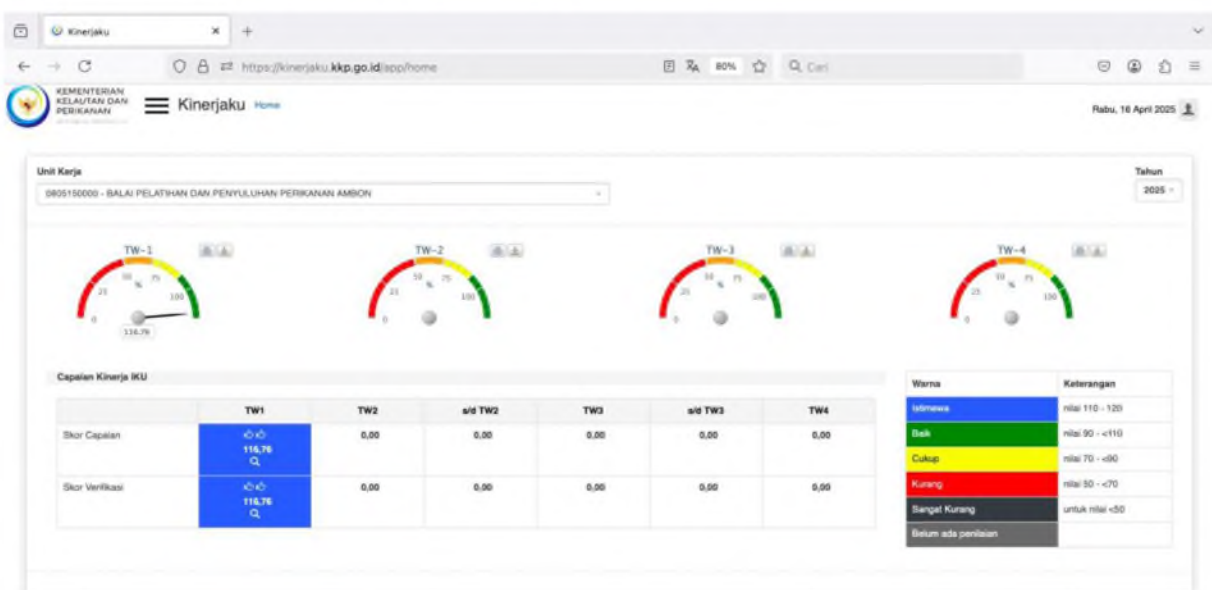
Metode pengukuran kinerja lingkup BPPP Ambon dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12), serta tahunan pada akhir tahun anggaran. Pengukuran ditugaskan kepada Tim Pengelola Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala BPPP Ambon Nomor B.14/BPPP.AMB/OT.710/I/2025 tentang Tim Penyusunan laporan Kinerja dan Triwulan BPPP Ambon Tahun 2025. Keanggotaan tim terdiri dari pejabat dan staf yang mewakili semua bagian lingkup BPPP Ambon. Berdasarkan laporan bagian penanggung jawab kegiatan, Kepala Balai c.q. Bagian Program, Monitoring dan Evaluasi merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Prestasi Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (Key Performance Indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis logical framework dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPP Ambon tahun 2025 sebesar 112,16 %, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 5. Dashboard Kinerjaku Level 3 BPPP Ambon

Selama Triwulan II tahun 2025, dari 12 IKU yang menjadi target Triwulan II tahun 2025 BPPP Ambon, telah terealisasi sesuai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPSDM KP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran kegiatan dan tujuan kegiatan dapat tercapai. BPPP Ambon untuk Triwulan II pada tahun 2025 memiliki beberapa kegiatan prioritas dengan capaian kinerja atas kegiatan prioritas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Capaian IKU BPPP Ambon Triwulan II tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 2	REALISASI TW 2	% REALISASI
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Ambon (Orang)	30	40	120
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	60	69	115
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,4	0,53	120
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	0	0	-
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana	5	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	0	0	-
	Pelatihan dan Penyuluhan KP					

3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Disuluh Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	1000	1100	110
		7	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	6	6	100
		8	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	18	40	120
		9	Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi Yang Mendapatkan Pendampingan oleh Satminkal BPPP Ambon (Unit)	5	6	120
4	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	10	Media Penyuluhan Sesuai Dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Ambon	0	0	-
5	Terselenggara Tata Kelola Penyuluhan dan Kelautan Perikanan	10	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan Yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Ambon (Orang)	0	0	-
6	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	12	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	50	51,67	103,34
		13	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	70	80,89	115,56
		14	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	85	85	100
		15	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)	0	0	-
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Ambon (%)	80	0	0
		17	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon (%)	80	100	120
		18	Nilai IKPA BPPP Ambon (Nilai)	84	99,84	118,86
		19	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	0	0	-

Sumber tabel : Aplikasi Kinerja KKP

Salah satu visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Restra Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah peningkatan kualitas SDM KP melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset Kelautan dan Perikanan. Dengan fokus kesejahteraan masyarakat dengan didukung oleh pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan

maka sasaran strategis tersebut menjadi tujuan utama pencapaian Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon dengan didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja utama atas sasaran strategis tersebut. BPPP Ambon sebagai bagian dari pembangunan kelautan dan perikanan melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsi atas pencapaian sasaran strategis tersebut dengan dukungan alokasi anggaran pada setiap IKU sasaran strategis tersebut melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan dengan sentuhan kegiatan penyuluhan KP.

Kegiatan 1. Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai sasaran kegiatan terselenggaranya pelatihan SDM kelautan dan perikanan terdapat 4 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 1: Jumlah Lulusan Pelatihan Satker BPPP Ambon Yang Terserap Di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Ambon (%), IKU 2: Masyarakat Kelautan dan Perikanan Yang Dilatih di BPPP Ambon (Orang), IKU 3: Nilai PNPB Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar), IKU 4 : Sumber daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang bersertifikat kompetensi di BPPP Ambon (orang)

Indikator Kinerja 1

Jumlah lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Ambon (orang)

IKU ini merupakan merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil pelatihan (meningkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap) yang bekerja di dunia

usaha dunia industri (DUDI) dibandingkan dengan jumlah total target pelatihan masyarakat yang diselenggarakan oleh BPPP Ambon Tahun 2025 dengan formula perhitungan lulusan pelatihan yang bekerja di DUDI dibagi total target pelatihan.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Ambon dapat dilihat pada tabel :

IKU-1. Persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Ambon (Orang)									
Realisasi TW 2				TW 2 2025				Renstra BPPP Ambon 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
18	0	0	0	30.00	40.00	120 (133,33)	0.00	1,294	3.09

Capaian indikator ini telah mencapai 40 orang dari target yaitu 30 orang. Khusus untuk Triwulan II Tahun 2025, IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan IKU Triwulan II Tahun 2024 karena IKU ini tidak tercapai Triwulan II, tetapi jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun 2024, untuk Triwulan II tahun 2025 sudah mencapai 3,09 %.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Perbandingan realisasi yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	4.539	5.240	120 (120,211)
2	BPPP Banyuwangi	70	70	100
3	BPPP Bitung	0	0	0
4	BPPP Ambon	30	40	120
5	BPPP Medan	0	0	0

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, BPPP Ambon berada pada posisi nomor 2 diantara 5 Satker yang sudah melakukan kegiatan terseerap di Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan menjangkau kelompok binaan penyuluh perikanan Satminkal BPPP Ambon.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah:

- a) Terdapat Manual IKU untuk Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Terserap di Dunia Usaha dan Dunia Kerja
- b) Surat Keterangan Dunia Usaha dari Kelurahan/Surat Pernyataan Bekerja/Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), Surat Izin Berusaha yang dimiliki kelompok usaha
- c) Kurikulum pelatihan telah dilakukan analisis kebutuhan pelatihan sehingga relevan dengan kebutuhan di dunia usaha/dunia industri saat ini.
- d) Sumberdaya Pelatih yang kompeten dengan dibuktikan telah memiliki sertifikasi kompetensi metodologi dan bidang keahlian dari Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

- a) Efisiensi biaya perjalanan sehingga membutuhkan peran penyuluh Penyuluh Perikanan dalam merekrutmen kelompok-kelompok binaan yang memiliki persyaratan yang benar dan valid.
- b) Kemudahan bagian pelatihan dalam merekap hasil dikarenakan hasil yang diperoleh sesuai dengan manual IKU sesuai dengan format yang ditetapkan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan II Tahun 2025, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Optimalisasi peran penyuluh perikanan dalam berperan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan SDM Manusia Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan pelatihan;
2. Menyusun Format Biodata peserta pelatihan yang sesuai dengan format manual IKU
3. Melakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan pelatihan menggunakan manual IKU sebagai bahan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pelatihan berikutnya.
4. Pelaksanaan pendampingan oleh Penyuluh perikanan dalam mengidentifikasi dan melakukan pengisian instrumen seperti biodata pelatihan dan pendampingan penerapan hasil pelatihan.

Indikator Kinerja 2

Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (orang).

IKU ini merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Masyarakat KP yang telah dilatih dengan kriteria : Pelatihan berbasis APBN, peserta merupakan masyarakat (non ASN), penyelenggaraan pelatihan regular (full tatap muka) dan pelatihan full online, dan peserta hanya satu kali mengikuti pelatihan di tahun yang sama, kecuali pelatihan dengan level kompetensi lebih tinggi dengan formula perhitungan Akumulasi jumlah masyarakat KP yang telah mengikuti pelatihan sesuai kriteria pelatihan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih sampai dengan tahun 2025 untuk triwulan II perbidang kompetensi baru bidang Budidaya .

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih dapat dilihat pada tabel :

Tabel 7. Capaian Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Ambon

IKU-2. Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)									
Realisasi TW 2				TW 2 2025				Renstra BPPP Ambon 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
714	796	1132	2106	60.00	69.00	115.00	-96.72	1,840	3.75

Capaian indikator ini telah mencapai 69 orang dari target yaitu 60 orang. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu triwulan II tahun 2024, terjadi penurunan sebesar 96,72% dan Triwulan II tahun 2025 sudah mencapai 3,75 %.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Perbandingan realisasi Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	8.530	10.473	120 (122,78)
2	BPPP Banyuwangi	300	300	100
3	BPPP Bitung	0	0	0
4	BPPP Ambon	60	69	115
11	BPPP Medan	0	0	0

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, BPPP Ambon berada pada posisi nomor 2 diantara 5 Satker dikarenakan Pelaksanaan pelatihan menggunakan sistem Full Online Training dengan menjangkau kelompok binaan penyuluh perikanan Satminkal BPPP Ambon.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah:

- a) Adanya SOP kegiatan pelatihan yang merupakan SOP utama BPPP Ambon
- b) Kalender pelatihan blanded telah disampaikan kepada Anggota Komisi IV DPR RI

sebagai komitmen kegiatan penyelenggaraan pelatihan yang harus dilaksanakan

- c) Adanya aplikasi SiPintar BPPP Ambon mempermudah dan mempersingkat waktu Identifikasi kebutuhan pelatihan dan pendaftaran pelatihan secara online
- d) Pelaksanaan pelatihan juga dilaksanakan secara online sehingga mudah untuk diakses masyarakat.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

- 1. Efisiensi biaya koordinasi persiapan pelatihan menggunakan media Whatshapp
- 2. Persiapan kegiatan pelatihan yang dilakukan secara intensif oleh panitia pelatihan dan penyuluh pendamping sehingga proses kegiatan pelatihan dapat berjalan dengan lancar sampai akhir kegiatan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan II Tahun 2025, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

- 1. Membuat kalender pelatihan KP sesuai arahan kebijakan pimpinan, kebutuhan daerah dan potensi daerah
- 2. Bekerjasama dengan Penyuluh pendamping rencana kegiatan pelatihan yang akan diselenggarakan baik secara zoom meeting maupun komunikasi secara intensif melalui telepon.

3. Upaya peningkatan kompetensi pelatih (instruktur dan widyaiswara) dan meningkatkan serta terus mengembangkan sarana dan prasarana penunjang pelatihan yang dimiliki.

Indikator Kinerja 3

Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar).

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan.

Cara perhitungan IKU tersebut dengan menjumlahkan seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan yang tercatat pada aplikasi OM SPAM BPPP Ambon.

Sampai akhir Tahun 2025 BPPP Ambon telah memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan berdasarkan surat dari Sekertaris BPPSDM KP Nomor : B.4602/BPPSDM.1/KU.340/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 tentang capaian kinerja PNBP Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 530.247.008 atau 64,76 % dari target Rp. 818.828.000

Tabel 9. Capaian Nilai PNBP Satker BPPP Ambon

IKU-3. Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)									
Realisasi TW 2				TW 2 2025				Renstra BPPP Ambon 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
0	0.25	0.29	0.29	0.81	0.53	65.43	82.76	0.81	65.43

Capaian indikator ini telah mencapai 0,53 rupiah miliar dari target yaitu 0,4 rupiah miliar. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya Realisasi yaitu triwulan II tahun 2024, terjadi peningkatan sebesar 82,76%. Terhadap target Renstra tahun 2025, capaian triwulan II tahun 2025 sebesar 65,45 %.

kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10. Perbandingan realisasi Nilai PNBP Satker dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	6,45	14,37	120 (222,79)
2	BPPP Banyuwangi	0,10	0,12	120
3	BPPP Bitung	0,6	0,8	120
4	BPPP Ambon	0,4	0,53	120
5	BPPP Medan	0,2	0,4	120

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, BPPP Ambon berada pada posisi nomor 3 diantara 5 Satker dikarenakan Komitmen Pimpinan dan Tim Humas dalam melakukan Promosi baik secara langsung maupun pada media sosial BPPP Ambon kegiatan strategis sebagai sumber penghasil PNBP serta membangun jejaring kerjasama dengan stakeholder dalam segi peningkatan kapasitas SDM KP.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah

- a) Adanya aplikasi SiPintar BPPP Ambon mempermudah dan mempersingkat waktu pendaftaran pelatihan BST bersumber dari PNBPN secara online
- b) Komitmen Pimpinan dan Tim Humas dalam melakukan Promosi baik secara langsung maupun pada media sosial BPPP Ambon kegiatan strategis sebagai sumber penghasil PNBPN serta membangun jejaring kerjasama dengan stakeholder dalam segi peningkatan kapasitas SDM KP.
- c) Peningkatan pelayanan pelatihan melalui pengembangan aplikasi digital.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penggunaan aplikasi SiPintar BPPP Ambon dalam melakukan pendaftaran pelatihan BST bersumber dari PNBPN memudahkan peserta dalam menginput berkas tanpa harus datang langsung ke BPPP Ambon
2. Pemanfaatan aset barang milik negara yang dilaksanakan secara optimal
3. Promosi dengan menggunakan media sosial lebih meningkatkan ruang lingkup promosi bahkan sampai luar Provinsi Maluku, sehingga dapat mengefisienkan anggaran promosi dan petugas yang melakukan promosi tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan II Tahun 2025, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Kegiatan pelatihan Basic Safety Training (BST) yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan kerjasama pelatihan yang menggunakan sarana dan prasarana BPPP Ambon yang sangat memadai.

3. Meningkatkan optimalisasi aset dan rapat monitoring capaian PNBK secara periodik.

Indikator Kinerja 4

Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (orang)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah SDM KP yang mengikuti uji kompetensi sesuai dengan persyaratan uji kompetensi. Peserta yang mendapatkan sertifikat kompetensi adalah yang sudah dinyatakan lulus sesuai dengan persyaratan dan ujian. Sertifikat dikeluarkan oleh LSP/BNKP dan atau Lembaga Sertifikasi lainnya.

Sampai triwulan II tahun 2025, BPPP Ambon belum melakukan uji kompetensi pelatihan dan peserta yang diuji untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah

1. Resertifikasi LSP BPPP Ambon telah terbit pada tahun 2023 sehingga dapat melakukan uji kompetensi kembali kepada lulusan peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPP Ambon.
2. Jumlah asesor kompetensi BPPP Ambon yang masih memenuhi standar kegiatan sertifikasi kompetensi baik bidang budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, permesinan kapal, penangkapan ikan dan konservasi perikanan.
3. Adanya sarana dan prasarana pelatihan dan lembaga pelatihan yang sudah tersertifikasi.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Kelengkapan sarana dan prasarana sertifikasi kompetensi yang tersedia di BPPP Ambon.
2. Promosi dengan menggunakan media sosial lebih meningkatkan ruang lingkup promosi bahkan sampai luar Provinsi Maluku, sehingga dapat mengefisiensi anggaran promosi dan petugas yang melakukan promosi tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan II Tahun 2025, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. kegiatan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan kerjasama sertifikasi kompetensi dengan sekolah-sekolah yang memutuskan sertifikasi kompetensi bagi anak didiknya.
3. Peningkatan sarana prasarana pelatihan dengan melakukan reakreditasi lembaga setiap tahunnya.
4. Mengupgrade kemampuan Asesor dan pelatih dengan melakukan RCC terhadap sertifikat asesor yang telah habis masa aktifnya.
5. Sosialisasi pelaksanaan pelatihan baik melalui media sosial maupun kerjasama dengan penyuluh perikanan dicalon lokasi pelatihan.

Sasaran Kegiatan 2

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP

Untuk mencapai sasaran kegiatan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP terdapat 1 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 5 : sarana dan prasarana pelatihan yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon

Indikator Kinerja 5

Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Ambon (unit)

Merupakan indikator Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPP Ambon dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2021, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung Jumlah Sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal.

Sampai akhir triwulan II Tahun 2025, BPPP Ambon masih melakukan identifikasi pengadaan sarana pelatihan dan penyuluhan KP sehingga penilaiannya masih 0 unit.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini pada akhir tahun adalah :

1. Tersedianya SOP pengadaan dan seluruh Proses pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan di LPSE.
2. Adanya komitmen pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran dan program yang telah ditetapkan, pelaksanaan pengadaan barang yang sesuai jadwal dan dapat diselesaikan tepat waktu serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang berkompeten.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Kegiatan pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan dengan baik dengan menunjuk pihak penyedia yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan dengan harga penawaran lebih rendah dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Pejabat pengadaan barang dan jasa telah memiliki sertifikat kompetensi sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan II Tahun 2025, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Kegiatan pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan menunjuk pihak penyedia yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan
2. BPPP Ambon membuat komitmen terkait penyelesaian Kegiatan pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Melaksanakan pengadaan barang yang tersedia pada layanan E-Katalog sehingga memudahkan untuk menyesuaikan spesifikasi barang yang dibutuhkan dan dilaksanakan oleh LPSE

Sasaran Kegiatan 3

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai sasaran kegiatan Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan terdapat 4 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 6 : Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Disuluh Oleh BPPP Ambon (Kelompok) , IKU 7 : Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok), IKU 8 : Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok) dan IKU 9 : Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi Yang Mendapatkan Pendampingan Oleh Satminkal BPPP Ambon (Unit).

Indikator Kinerja 6

Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Disuluh Oleh BPPP Ambon (Kelompok)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku pendukung yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan.

IKU ini sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP Ambon pada tahun 2017, sampai akhir triwulan II tahun 2025 Penyuluh Satminkal BPPP Ambon sudah melakukan penyuluhan sebanyak 1100 kelompok dari target triwulna II Tahun 2025 kelompok yang disuluh sebanyak 1000 kelompok.

Tabel 11. Capaian Jumlah kelompok pelaku utama /pelaku pendukung yang disuluh oleh BPPP Ambon

IKU-6. Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh Oleh BPPP Ambon (Orang)									
Realisasi TW 2				TW 2 2025				Renstra BPPP Ambon 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
2083	1540	1400	2030	2,939	1,100	37.43	-45.81	2,939	37.43

Capaian indikator ini telah mencapai 1100 kelompok dari target yaitu 1000 kelompok. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu triwulan II tahun 2024, terjadi penurunan sebesar 45,81%, terhadap target Renstra tahun 2025, capaian triwulan II tahun 2025 sebesar 37,43 %.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Perbandingan realisasi jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha KP yang disuluh dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	0	0	0
2	BPPP Banyuwangi	1800	1900	105,56
3	BPPP Bitung	300	320	106,67
4	BPPP Ambon	1000	1100	110
5	BPPP Medan	1650	1938	117,45

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, posisi BPPP Ambon berada pada posisi nomor 2 diantara 5 satker lainnya dikarenakan baiknya pengelolaan kinerja penyuluh dengan output yang ditargetkan per masing-masing penyuluh.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh berdasarkan perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang tercasading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan II Tahun 2025, BPPP Ambon memiliki kegiatan strategis, yaitu

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya berdasarkan perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan.
2. Melaksanakan koordinasi antara penyuluh perikanan/penyuluh perikanan bantu untuk melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap kelompok binaan serta memfasilitasi kelompok dalam mendapatkan akses permodalan, akses pasar, akses iptek dan meningkatkan PKS kelompok melalui sosialisasi baik peraturan atau teknologi informasi terkini dibidang perikanan.

Indikator Kinerja 7

Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku pendukung yang meningkat kelas kelompoknya sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan.

IKU ini sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP

Ambon pada tahun 2017, akan tetapi pola perhitungannya adalah perhitungan secara individu atau perorangan.

Sampai akhir triwulan II tahun 2025, Penyuluh Satminkal BPPP Ambon telah melakukan peningkatan kelas kelompok pelaku utama/pelaku pendukung BPPP Ambon sebanyak 6 kelompok dari target sebanyak 6 kelompok.

Tabel 12. Capaian Kelompok pelaku utama/pelaku pendukung yang ditingkatkan kelasnya oleh BPPP Ambon

IKU-7. Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok)									
Realisasi TW 2				TW 2 2025				Renstra BPPP Ambon 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
18	5	22	30	70	6	8.57	-80.00	6	100.00

Capaian indikator ini telah mencapai 6 kelompok dari target yaitu 6 kelompok. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu triwulan 1 tahun 2024, tidak terjadi peningkatan. Terhadap target Renstra tahun 2025, capaian tahun 2025 sebesar 100 %.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13. Perbandingan realisasi Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di satker BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	0	0	0
2	BPPP Banyuwangi	20	20	100
3	BPPP Bitung	10	11	110
4	BPPP Ambon	6	6	100
5	BPPP Medan	10	12	120

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, posisi BPPP Ambon berada pada posisi nomor 4 diantara 5 satker lainnya dikarenakan baiknya pengelolaan kinerja penyuluh dengan output yang ditargetkan per masing-masing penyuluh.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah

1. Adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan penyuluhan Kelautan dan Perikanan.
2. Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan sehingga membantu Penyuluh Perikanan melakukan pendampingan

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang terascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan II Tahun 2025, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Penyuluh melakukan pendampingan kelompok dan telah mengidentifikasi dan melakukan peningkatan kelas kelompok terhadap calon kelompok dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan melalui pendampingan yang dilakukan.
3. Koordinasi secara rutin dengan Dinas Perikanan setempat terkait proses peningkatan kelas kelompok.
4. Surat Keputusan dan verifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pejabat Pemerintah Daerah telah ditetapkan.

Indikator Kinerja 8

Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)

Merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama/pelaku pendukung yang ditumbuhkan dan dibentuk dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan.

IKU ini sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP Ambon pada tahun 2017, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung Jumlah kelompok Pelaku utama yang dibentuk yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penumbuhan kelompok yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Sampai akhir triwulan II tahun 2025, Penyuluh Satminkal BPPP ambon telah melakukan pendataan calon kelompok yang ditumbuhkan kelompoknya sebanyak 40 kelompok dari target triwulan II tahun 2025 sebanyak 18 kelompok.

Tabel 14. Capaian Kelompok pelaku utama/pelaku pendukung yang dibentuk oleh BPPP Ambon

IKU-8. Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)									
Realisasi TW 2				TW 2 2025				Renstra BPPP Ambon 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
68	110	110	130	291	40	13.75	-69.23	291	13.75

Capaian indikator ini telah mencapai 40 kelompok dari target yaitu 18 kelompok. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu triwulan 2 tahun 2024, terjadi penurunan 69,23 %. Terhadap target Renstra tahun 2025, capaian triwulan II tahun 2025 sebesar 13,75 %.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15. Perbandingan realisasi Kelompok Kelautan dan Perikanan yang dibentuk dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	0	0	0
2	BPPP Banyuwangi	134	165	120
3	BPPP Bitung	50	50	100
4	BPPP Ambon	18	40	120
5	BPPP Medan	160	192	120

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, posisi BPPP Ambon berada pada posisi nomor 2 diantara 5 satker lainnya dikarenakan

baiknya pengelolaan kinerja penyuluh dengan output yang ditargetkan per masing-masing penyuluh.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan penyuluhan Kelautan dan Perikanan.
2. Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan sehingga membantu Penyuluh Perikanan melakukan pendampingan Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang terascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan II Tahun 2025, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Antusias masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan pada tahun 2025.

- Kegiatan Pendampingan oleh Penyuluh yang terjadwal dan efektif kepada pelaku utama KP dan memfasilitasi antusiasme masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan baru di wilayahnya

Indikator Kinerja 9

Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi Yang Mendapatkan Pendampingan Oleh Satminkal BPPP Ambon (Unit).

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang didampingi oleh penyuluh kelautan dan perikanan dengan kriteria sesuai dengan Permen KP no 28 tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

IKU ini adalah IKU baru yang ada pada tahun 2025, cara perhitungannya adalah menjumlahkan Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan Penyuluh kelautan dan perikanan.

Sampai akhir triwulan II tahun 2025, Penyuluh Satminkal BPPP ambon telah melakukan pendataan gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan Penyuluh kelautan dan perikanan sebanyak 6 unit dari target triwulan II tahun 2025 sebanyak 5 unit.

Tabel 16. Capaian Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan oleh Satminkal BPPP Ambon

IKU-9. Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Ambon (Unit)									
Realisasi TW 2				TW 2 2025				Renstra BPPP Ambon 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
0	0	0	0	46	6	13.04		46	13.04

Capaian indikator ini telah mencapai 6 unit dari target yaitu 1 unit. IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan IKU ini merupakan IKU baru ditahun 2025. Terhadap target Renstra tahun 2025, capaian triwulan I tahun 2025 sebesar 13,04 %.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17. Perbandingan realisasi Gabungan Kelompok/ Koperasi/ Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan oleh Satminkal BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	0	0	0
2	BPPP Banyuwangi	6	6	100
3	BPPP Bitung	7	8	114,29
4	BPPP Ambon	5	6	120
5	BPPP Medan	10	12	120

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, posisi BPPP Ambon berada pada posisi nomor 2 diantara 5 satker lainnya dikarenakan baiknya pengelolaan kinerja penyuluh dengan output yang ditargetkan per masing-masing penyuluh.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Adanya Peraturan Kepala BRSDM KP nomor 63 tahun 2022 tentang pedoman kerja penyuluh perikanan, asisten penyuluh perikanan PPTK dan penyuluh perikanan bantu.
2. Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan sehingga membantu Penyuluh Perikanan melakukan pendampingan

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang terascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan II Tahun 2025, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Antusias masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan pada tahun 2024.
3. Kegiatan Pendampingan oleh Penyuluh yang terjadwal dan efektif kepada pelaku utama KP dan memfasilitasi antusiasme masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan baru di wilayahnya

Sasaran Kegiatan 4

Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai sasaran kegiatan Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan

Perikanan, terdapat 2 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 10 : Media Penyuluhan Sesuai Dengan Kebutuhan Pelaku Utama di Satker BPPP Ambon (Paket); IKU 11 : Jumlah Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Ambon (orang)

Indikator Kinerja 10

Media Penyuluhan Sesuai Dengan Kebutuhan Pelaku Utama di Satker BPPP Ambon (Paket)

Media penyuluhan merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku usaha. Media penyuluhan terdiri atas media tercetak, media terdengar dan media tertayang. Media tercetak misalnya folder, leaflet, poster dan lainnya. Media terdengar antara lain naskah siaran radio. Media tertayang antara lain video, podcast dan lainnya.

IKU ini adalah IKU baru yang ada pada tahun 2025, cara perhitungannya adalah menghitung jumlah media yang disusun dan digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan oleh Penyuluh Perikanan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP sesuai binaannya

Sampai akhir triwulan II tahun 2025, Penyuluh Satminkal BPPP Ambon masih melakukan pendataan media yang disusun dan digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan dan perhitungannya akan dilakukan pada akhir tahun 2025 sehingga pencapaiannya masih 0.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Adanya Peraturan Kepala BRSDM KP nomor 63 tahun 2022 tentang pedoman kerja penyuluh perikanan, asisten penyuluh perikanan PPTK dan penyuluh perikanan bantu.

2. Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan

Media penyuluhan merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku usaha. Media penyuluhan terdiri atas media tercetak, media terdengar dan media tertayang. Media tercetak misalnya folder, leaflet, poster dan lainnya. Media terdengar antara lain naskah siaran radio. Media tertayang antara lain video, podcast dan lainnya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.

Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang terascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan II Tahun 2025, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Antusias masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan pada tahun 2024.

3. Kegiatan Pendampingan oleh Penyuluh yang terjadwal dan efektif kepada pelaku utama KP dan memfasilitasi antusiasme masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan baru di wilayahnya

Sasaran Kegiatan 5

Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai sasaran kegiatan Terselenggaranya tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, terdapat 1 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 11 : Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan Yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Ambon (Orang)

Indikator Kinerja 11

Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan Yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Ambon (Orang)

Merupakan indikator yang menunjukkan Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang mengikuti dan lulus pelatihan teknis dalam 2 tahun terakhir dan mendapatkan sertifikat pelatihan teknis kelautan dan perikanan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan yang memiliki kewenangan sesuai aturan yang berlaku.

Hitung jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Ambon per Januari 2025.

IKU ini adalah IKU baru yang ada pada tahun 2025, cara perhitungannya adalah menghitung jumlah media yang disusun dan digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan oleh Penyuluh Perikanan kepada pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor KP sesuai binaannya

Sampai akhir triwulan II tahun 2025, Satminkal BPPP Ambon masih melakukan pendataan penyuluh kelautan dan perikanan yang akan mengikuti pelatihan teknis dan perhitungannya akan dilakukan pada akhir tahun 2025 sehingga pencapaiannya masih

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Adanya Peraturan Kepala BRSDM KP nomor 63 tahun 2022 tentang pedoman kerja penyuluh perikanan, asisten penyuluh perikanan PPTK dan penyuluh perikanan bantu.
2. Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan sehingga membantu Penyuluh Perikanan melakukan pendampingan

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang tercasading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan II Tahun 2025, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Antusias masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan pada tahun 2024.

3. Kegiatan Pendampingan oleh Penyuluh yang terjadwal dan efektif kepada pelaku utama KP dan memfasilitasi antusiasme masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan baru di wilayahnya.

Sasaran Kegiatan 6

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon

Untuk mencapai sasaran kegiatan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan, terdapat 8 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 12; Presentase layanan dokumen manajemen internal BPPP Ambon (%); IKU 13; Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (Indeks); IKU 14; Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPP Ambon (%); IKU 15; Penilaian mandiri SAKIP BPPP Ambon; IKU 16; Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Ambon (%); IKU 17; Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Ambon (%); IKU 18; Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai); IKU 19; Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai).

Indikator Kinerja 12

Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)

Merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan layanan dukungan manajemen internal berupa tersedianya laporan-laporan kegiatan BPPP Ambon.

Perhitungan Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon ini dihitung berdasarkan pemenuhan laporan-laporan kegiatan BPPP Ambon berupa laporan tahunan, laporan pelaksanaan program dan kegiatan dan laporan keuangan.

Perhitungan ini dilakukan triwulan II tahun 2025, sesuai dengan data dukung yang telah dikerjakan, BPPP Ambon sudah memenuhi dokumen pendukung sebanyak baru mencapai 51,67 %

Tabel 18. Pemenuhan dokumen Persentase layanan dukungan manajemen internal
BPPP Ambon

No.	Nama Dokumen	Periode Pelaporan	Target Jumlah Dokumen (Tahunan)	Jumlah Dokumen (Triwulan II)
1	Dokumen Perencanaan Anggaran			
	1) Dokumen KAK	Tahunan	1	1
	2) Dokumen RAB	Tahunan	1	1
	3) Dokumen RKAKL	Tahunan	1	1
2	Dokumen Perencanaan Kinerja			
	1) Perjanjian Kinerja	Tahunan	1	1
	2) Rencana Aksi	Tahunan	3	1
	3) Rincian Target IKU	Tahunan	1	1
	4) Manual IKU	Tahunan	1	1
3	Dokumen Reviu Renstra	Tahunan	1	1
4	Dokumen Laporan Kinerja			
	1) LKj Triwulan IV Tahun 2024	Triwulan	1	1
	2) LKj Triwulan I Tahun 2025	Triwulan	1	1
	3) LKj Triwulan II Tahun 2025	Triwulan	1	
	4) LKj Triwulan III Tahun 2025	Triwulan	1	
5	Dokumen Laporan SPIP	Mingguan		
	1) Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2024	Triwulan	1	1
	2) Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2025	Triwulan	1	1
	3) Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2025	Triwulan	1	
	4) Laporan SPIP Triwulan III Tahun 2025	Triwulan	1	
6	Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara	Bulanan		
	1) LPj Bendahara Bulan Desember 2024	Bulanan	1	1
	2) LPj Bendahara Bulan Januari	Bulanan	1	1
	3) LPj Bendahara Bulan Februari	Bulanan	1	1
	4) LPj Bendahara Bulan Maret	Bulanan	1	1
	5) LPj Bendahara Bulan April	Bulanan	1	1

No.	Nama Dokumen	Periode Pelaporan	Target Jumlah Dokumen (Tahunan)	Jumlah Dokumen (Triwulan II)
	6) LPj Bendahara Bulan Mei	Bulanan	1	1
	7) LPj Bendahara Bulan Juni	Bulanan	1	
	8) LPj Bendahara Bulan Juli	Bulanan	1	
	9) LPj Bendahara Bulan Agustus	Bulanan	1	
	10) LPj Bendahara Bulan September	Bulanan	1	
	11) LPj Bendahara Bulan Oktober	Bulanan	1	
	12) LPj Bendahara Bulan November	Bulanan	1	
7	Dokumen Laporan PNPB	Bulanan		
	1) Bulan Desember 2024	Bulanan	1	1
	2) Bulan Januari	Bulanan	1	1
	3) Bulan Februari	Bulanan	1	1
	4) Bulan Maret	Bulanan	1	1
	5) Bulan April	Bulanan	1	1
	6) Bulan Mei	Bulanan	1	1
	7) Bulan Juni	Bulanan	1	
	8) Bulan Juli	Bulanan	1	
	9) Bulan Agustus	Bulanan	1	
	10) Bulan September	Bulanan	1	
	11) Bulan Oktober	Bulanan	1	
	12) Bulan November	Bulanan	1	
8	Dokumen Laporan Bulanan			
	1) Bulan Desember 2024	Bulanan	1	1
	2) Bulan Januari	Bulanan	1	1
	3) Bulan Februari	Bulanan	1	1
	4) Bulan Maret	Bulanan	1	1
	5) Bulan April	Bulanan	1	1
	6) Bulan Mei	Bulanan	1	1
	7) Bulan Juni	Bulanan	1	
	8) Bulan Juli	Bulanan	1	
	9) Bulan Agustus	Bulanan	1	
	10) Bulan September	Bulanan	1	
	11) Bulan Oktober	Bulanan	1	
	12) Bulan November	Bulanan	1	
9	Dokumen Laporan Tahunan			
	1) Tahun 2024	Bulanan	1	1
10	Laporan Keuangan	Semester		
	1) Semester I Tahun 2025	Semester	1	
11	Laporan BMN	Semester		
	1) Semester I Tahun 2025	Semester	1	
12	Laporan PM SAKIP	Tahunan	1	
13	Laporan Barang KPA	Tahunan	1	
14	Laporan PIPK Tahun 2025	Tahunan	1	
		Jumlah	60	31
		%	100	51.67

Tabel 19. Capaian Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon

IKU-12. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP (%)									
Realisasi TW 2				TW 2 2025				Renstra BPPP Ambon 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
0	0	50	51.73	100	51.67	51.67	-0.12	100	51.67

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan II sudah mencapai 51,67 % dari target yaitu 100%.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20. Perbandingan realisasi Persentase layanan dukungan manajemen internal dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	50	55	110
2	BPPP Banyuwangi	50	52,73	105,46
3	BPPP Bitung	50	50	100
4	BPPP Ambon	50	51,67	103,34
5	BPPP Medan	50	52,73	105,46

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, posisi BPPP Ambon berada pada posisi nomor 3 diantara 5 satker lainnya dikarenakan baiknya pengelolaan kinerja manajemen internal dengan output yang ditargetkan per masing-masing pegawai.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Tersedianya SOP terkait pembuatan seluruh laporan yang merupakan bagian dari layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon.
2. Dokumen dukungan internal merupakan dokumen yang harus ada dimiliki dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini dengan mengetahui Progres capaian IKU triwulanan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, mengingat seluruh penyusunan laporan yang merupakan bagian dari layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon tersebut telah didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai sehingga efektifitas dan efisiensi dalam pemenuhan dokumen tersebut dapat dilakukan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh dokumen yang telah ditargetkan dapat terpenuhi dengan baik
2. Kegiatan penyusunan laporan /dokumen dukungan internal.

Indikator Kinerja 13

Indeks profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks).

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai IKU ini diperoleh berdasarkan dashboard IP ASN pada laman <https://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2023/unker/962?page=1> dan dilakukan perhitungan setiap semester sehingga pencapaian pada triwulan II tahun 2025 sebesar 80,89.

Tabel 21. Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon

Realisasi TW 2				TW 2 2025				Renstra BPPP Ambon 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
72.13	73.47	74.85	79.74	83	80.89	97.46	1.44	83	97.46

Capaian indikator ini telah mencapai 80,89 dari target yaitu 83. Jika dibandingkan dengan Capaian indikator dengan tahun sebelumnya yaitu triwulan II tahun 2024 terjadi peningkatan. Terhadap target Renstra tahun 2025, capaian tahun 2025 sebesar 97,46 %.

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 22. Perbandingan realisasi Persentase Indeks Profesionalitas ASN dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	70	78,43	112,04
2	BPPP Banyuwangi	70	76,44	109,20
3	BPPP Bitung	70	81,94	117,06
4	BPPP Ambon	70	80,89	115,56
5	BPPP Medan	70	78,82	112,60

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, posisi BPPP Ambon berada pada posisi nomor 2 diantara 5 satker lainnya dikarenakan baiknya pengelolaan kinerja manajemen internal dengan output yang ditargetkan per masing-masing pegawai.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Terdapat pegawai lingkup BPPP Ambon yang mendapatkan peningkatan pendidikan, sehingga kualifikasi pendidikannya meningkat;
2. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan dan seminar daring;
3. Komitmen pimpinan dan kesadaran untuk meningkatkan kompetensi secara daring;
4. Kesadaran pegawai untuk menyampaikan sertifikat pengembangan kompetensi kepada pengelola kepegawaian; dan
5. Keaktifan pengelola kepegawaian dalam mengingatkan dan memutakhirkan data peningkatan kompetensi maupun pendidikan.

Dengan adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan tersebut, progres capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, mengingat seluruh pemenuhan dokumen dan laporan harus memiliki konsistensi kepatuhan dalam penyusunan sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

Peningkatan atau keberhasilan tercapainya target Nilai IP ASN BPPP Ambon ini antara lain disebabkan oleh komitmen seluruh pegawai di lingkup BPPP Ambon, operator simpeg dan pengelola kepegawaian lainnya. Untuk mendapatkan data-

data terkini, masing-masing pegawai dapat mengunggah dokumen bukti diklat-diklat yang diikuti dan melakukan entri data diklat atau seminar yang diikuti, atau menyerahkan kepada operator simpeg untuk dilakukan entri data sehingga nilai kompetensi pegawai dapat sesuai. Media sosial Whatsapp menjadi salah satu alat komunikasi untuk penyampaian pemutakhiran data, dan memonitor pergerakan nilai sehingga target IKU ini dapat tercapai.

Indikator Kinerja 14

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan II 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon I lingkup KKP.

Cara perhitungan IKU ini dengan cara Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 70% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.

$$\% \text{ Rekomendasi} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen}}{\text{Jumlah Rekomendasi Yang Sudah Ditindaklanjuti Secara Tuntas}} \times 100\%$$

IKU ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari BPPSDM KP yang akan dihitung setiap triwulanan dan berdasarkan surat dari Sekertaris BPPSDM KP **Nomor B.3218/BPPSDM.1/HP.510/IV/2025 tanggal 14 April 2025 tentang Capaian IKU** Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I I Tahun 2025

Lingkup BPPSDM KP, BPPP Ambon memperoleh nilai sebesar 85% dari target triwulan I Itahun 2025 sebesar 85%.

Tabel 22. Capaian Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon

IKU-14. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPP Ambon (%)									
Realisasi TW 2				TW 2 2025				Renstra BPPP Ambon 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
0	100	100	100	85.00	85.00	100	-15.00	85.00	100

Sampai dengan Triwulan II Capaian indikator ini masih 0% dari target yaitu 85%.

Realisasi kinerja IKU ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 23. Perbandingan realisasi persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realsiasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	85	85	100
2	BPPP Banyuwangi	85	85	100
3	BPPP Bitung	85	85	100
4	BPPP Ambon	82	85	100
5	BPPP Medan	85	85	100

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, posisi BPPP Ambon hampir setara dengan Satker lainnya dikarenakan baiknya pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja melalui aplikasi SIDAK.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Memiliki SOP terkait pengisian aplikasi SIDAK KKP yang merupakan bagian dari penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja.
2. Komitmen penanggung jawab kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi pengawasan dari Itjen.

Kegiatan strategis yang telah dilakukan adalah peningkatan kompetensi operator yang menangani aplikasi SIDAK KKP sehingga progres capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, pengisian aplikasi SIDAK KKP sesuai dengan SOP turut memberikan kontribusi yang baik terhadap pemenuhan capaian IKU tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan II Tahun 2025, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat Jenderal KKP secara tepat waktu dan mengupload hasil tindaklanjut tersebut kedalam aplikasi SIDAK
2. Berkoordinasi Inspektorat Jenderal KKP untuk mengkonfirmasi temuan yang sudah ditindaklanjuti agar dapat segera menuntaskan status temuan menjadi nihil pada aplikasi SIDAK.

Indikator Kinerja 15

Penilaian Mandiri SAKIP Satker BPPP Ambon (Nilai)

Penilaian Mandiri SAKIP Satker dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni

perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Satker .

IKU ini merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2023, cara perhitungannya dengan menghitung nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri dari Tim SAKIP BPPSDM. Sampai pada Triwulan II tahun 2025, BPPP Ambon masih melakukan pengumpulan data terkait pemenuhan dokumen SAKIP dan hasil capaiannya akan dilakukan pada akhir tahun 2025 sehingga pencapaiannya masih 0.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Adanya aplikasi Kinerjaku yang telah memuat menu template penilaian mandiri SAKIP sehingga memudahkan dalam penyusunan dokumen penilaian mandiri SAKIP.
2. Adanya ketersediaan dokumen perencanaan, pengukuran dan pelaporan selama 5 tahun.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani SAKIP
2. Aplikasi Kinerjaku yang memuat menu template penilaian mandiri SAKIP
3. Operator yang menangani penilaian mandiri SAKIP dan Kinerjaku masih petugas yang sama sehingga memudahkan pemahaman pemenuhan dokumen penilaian mandiri SAKIP BPPP Ambon.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada Tahun 2025, BPPP Ambon memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM KP melalui kegiatan Kick Off Meeting Implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh BRSDM KP

2. Dokumen penilaian mandiri SAKIP telah disusun dari awal tahun sebagai dokumen persyaratan pemenuhan dokumen Kinerja per triwulan
3. Penyimpanan dokumen penilaian mandiri SAKIP terletak pada Google Drive milik BPPP Ambon
4. Adanya upaya baru dalam perencanaan/pengukuran dan pelaporan kinerja.

Indikator Kinerja 16

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Ambon (%)

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN satker BPPP Ambon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IKU ini adalah IKU baru yang ada pada tahun 2025, Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan perikanan diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut :

Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025:

- Tersedianya dokumen RKBMN Tahun 2026 (bobot 5%)
- Tingkat pemanfaatan RKBMN dalam penyusunan RKAKL Tahun 2025 (bobot 7,5%)
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN sampai dengan triwulan III tahun 2025 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- Tersedianya usulan Pemindahtanganan dan/atau Penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 (bobot 25%);
- Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 20%);

- Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).
- Penyusunan/Penyampaian Usulan RKBMN Tahun 2027 (5%)

Sampai akhir triwulan II tahun 2025, BPPP Ambon masih melakukan pendataan pengelolaan BMN dan perhitungannya akan dilakukan pada akhir tahun 2025 sehingga pencapaiannya masih 0.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Memiliki SOP terkait pengisian aplikasi SIMAK BMN yang merupakan bagian dari pengelolaan BMN.
2. Komitmen penanggung jawab kegiatan untuk memantau pengisian aplikasi SIMAK BMN yang merupakan bagian dari pengelolaan BMN.

Kegiatan strategis yang telah dilakukan adalah peningkatan kompetensi operator yang menangani aplikasi SIMAK BMN sehingga progres capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, pengisian aplikasi SIMAK BMN sesuai dengan SOP turut memberikan kontribusi yang baik terhadap pemenuhan capaian IKU tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Triwulan II Tahun 2025, BPPP Ambon melakukan koordinasi dengan KPKNL Kota Ambon terkait mekanisme kepatuhan pengelolaan BMN BPPP Ambon.

Indikator Kinerja 17

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Ambon (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

IKU ini adalah IKU baru yang ada pada tahun 2025, cara perhitungan persentase RUP PBJ yang diumumkan adalah nilai rencana umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP dibagi pagu pengadaan barang/jasa dikalikan 100%.

IKU ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari Biro Umum PBJ yang akan dihitung setiap triwulanan dan berdasarkan surat dari Sekertariat Jenderal KKP Nomor 2/SJ.7/TU.140/IV/2025 tanggal 14 April 2025 tentang penyampaian hasil perhitungan capaian indikator kinerja presentase Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP triwulan I tahun anggaran 2025, BPPP

Ambon memperoleh nilai sebesar 100% dari target triwulan II tahun 2025 sebesar 80%.

Tabel 24. Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon (%)

IKU-17. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Ambon (%)									
Realisasi TW 2				TW 2 2025				Renstra BPPP Ambon 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
0	0	0	0	80	100	120 (125)	0	85.00	118

Sampai dengan Triwulan I Capaian indikator ini masih 0% dari target yaitu 85%.

Realisasi kinerja IKU ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 25. Perbandingan realisasi Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon dengan BPPP Lingkup BPPSDM KP

No.	Nama Satker	Target	Realisasi	% Capaian
1	BPPP Tegal	80	100	120
2	BPPP Banyuwangi	80	100	120
3	BPPP Bitung	80	100	120
4	BPPP Ambon	80	100	120
5	BPPP Medan	80	100	120

Jika melihat perbandingan nilai capaian dari satker lain pada tabel diatas, posisi BPPP Ambon hampir setara dengan Satker lainnya dikarenakan baiknya pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja melalui aplikasi SIDAK.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Memiliki SOP terkait pengisian aplikasi SIRUP KKP yang merupakan bagian dari Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan
2. Komitmen penanggung jawab kegiatan untuk mengumumkan seluruh RUP PBJ pada aplikasi SIRUP

Kegiatan strategis yang telah dilakukan adalah peningkatan kompetensi operator yang menangani aplikasi SIRUP KKP sehingga progres capaian IKU triwulanan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir Tahun 2024, BPPP Ambon melakukan koordinasi dengan Biro UMUM PBJ KKP terkait progres rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

Indikator Kinerja 18

Nilai IKPA BPPP Ambon (nilai).

Nilai IKPA adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 90,50%, tahun 2018 sebesar 86,83%, pada tahun 2019 sebesar 95,39%, tahun 2020 sebesar 92,83%, tahun 2021 sebesar 97,44% dan tahun 2022 sebesar 94,48%

Terdapat 12 indikator penilaian yaitu: Pengelolaan UP, Data Kontrak, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Hal III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian tagihan Rekon LPJ, Renkas, Realisasi, PAGU Minus dan Dispensasi SPM.

Tabel 26. Capaian Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Nilai)

IKU-18. Nilai IKPA Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)									
Realisasi TW 2				TW 2 2025				Renstra BPPP Ambon 2025 – 2029	
2021	2022	2023	2024	Target 2025	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2024-2025	Target 2025	% Capaian thd target 2025
88.28	0	90.05	99.48	92	99.84	109	0.37	92	109

IKU ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari BPPSDM KP yang akan dihitung setiap semesteran sehingga nilai pencapaiannya untuk Triwulan II sudah mencapai 99,85 .

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah :

1. Tersedianya SOP terkait pengisian aplikasi OM SPAN yang merupakan bagian dari Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPPP Ambon.
2. Pemahaman yang cukup baik dari satuan kerja Banyuwangi terhadap komponen dan indikator dari penilaian IKPA serta disiplin dalam pelaksanaan anggaran

Dengan adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan tersebut, progres capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, pengisian aplikasi OM SPAN oleh SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya turut memberikan kontribusi yang baik terhadap pemenuhan capaian IKU tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan II Tahun 2025, BPPP Ambon melakukan melakukan pembahasan monitoring data kontrak, monitoring uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang harus dipertanggungjawabkan serta pembahasan deviasi lembar IIII DIPA Pembahasan revisi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan penyesuaian RPD (halaman IIII DIPA.

Indikator Kinerja 19

Nilai kinerja perencanaan anggaran BPPP Ambon (nilai).

Nilai Kinerja perencanaan anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 90,50%, tahun 2018 sebesar 86,83%, pada tahun 2019 sebesar 95,39%, pada tahun 2020 sebesar 92,03%, pada tahun 2021 sebesar 85,51% dan pada tahun 2022 sebesar 86,99%

Proses penilaian IKU ini bersifat tahunan dan akan diukur pada akhir tahun 2025 sehingga nilai pencapaiannya masih 0.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah pemahaman yang cukup baik dari satuan kerja terhadap komponen dan indikator dari penilaian NKPA serta disiplin dalam pelaksanaan penganggaran.

Dengan adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan tersebut, progres capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, pengisian aplikasi SMART DJA oleh SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya turut memberikan kontribusi yang baik terhadap pemenuhan capaian IKU tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan II Tahun 2025, BPPP Ambon melakukan pengisian Manual Indikator Kinerja Program dan realisasi capaian Indikator Kinerja Program pada Aplikasi SAKTI secara tepat waktu dan Melakukan pemantauan pengisian capaian output pada Aplikasi SAKTI secara berkala dan tepat waktu.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Penyerapan anggaran BPPP Ambon pada Tanggal 31 Juni 2025, dapat dilihat pada tabel 58 berikut :

Tabel 27. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Juni 2025 Sumber data : Aplikasi OmSpan Kemenkeu

KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
PROGRAM RISET SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	52,988,789,000	26,151,562,749	49.35	26,837,226,251
<i>Program Pendidikan dan Pelatihan Vakasi</i>	<i>4,473,449,000</i>	<i>1,091,700,280</i>	<i>24.40</i>	<i>3,381,748,720</i>
Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang bersertifikat kompetensi	18,000,000	-	-	18,000,000
Peralatan dan Mesin Pelatihan Penyuluhan KP	70,000,000	-	-	70,000,000
Masyarakat Kelautan dan Perikanan Yang dilatih	2,495,441,000	32,340,000	1.30	2,463,101,000
Kelompok pelaku utama/usaha yang mendapat pendampingan dan penyuluhan KP	1,890,008,000	1,059,360,280	56.05	830,647,720
<i>Program Dukungan Manajemen</i>	<i>48,515,340,000</i>	<i>25,059,862,469</i>	<i>51.65</i>	<i>23,455,477,531</i>
<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>	<i>48,425,340,000</i>	<i>25,054,826,569</i>	<i>51.74</i>	<i>23,370,513,431</i>
Layanan Umum	70,000,000	10,919,978	15.60	59,080,022
Gaji dan Tunjangan	42,155,340,000	23,492,441,290	55.73	18,662,898,710
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6,200,000,000	1,551,465,301	25.02	4,648,534,699
<i>Layanan manajemen Kinerja Internal</i>	<i>90,000,000</i>	<i>5,035,900</i>	<i>5.60</i>	<i>84,964,100</i>

Secara umum kinerja BPPP Ambon pada triwulan II tahun 2025 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti sosialisasi kepada penyuluh PNS dan PPB Satminkal BPPP Ambon tentang mekanisme pembayaran BOP sehingga anggaran BOP Penyuluh PNS dan PPB dapat dibayarkan penuh setiap bulannya.

Pemetaan anggaran pendukung indikator kinerja utama BPPP Ambon disajikan dalam bentuk sebagai berikut :

Tabel 28. Pemetaan anggaran pendukung indikator kinerja utama sampai dengan tanggal 31 Juni 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	% REALISASI
1	Jumlah Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Ambon (Orang)	13,200,000		-
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	2,030,057,000	32,340,000	1.59
3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	465,384,000		-
4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	18,000,000		-
5	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung Yang Disuluh Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	592,738,000	353,120,093	59.57
6	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh Satminkal BPPP Ambon (Kelompok)	592,738,000	353,110,093	59.57
7	Kelompok Kelautan dan Perikanan Yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	592,739,000	333,120,000	56.20
8	Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan oleh Satminkal BPPP Ambon (Unit)	111,793,000	20,010,094	17.90
9	Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Ambon (Paket)	3,802,932,000	1,163,188,393	30.59
10	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di Satminkal BPPP Ambon	31,858,899,000	18,910,177,484	59.36
11	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	70,000,000		-
12	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	6,200,000,000	3,419,075,413	55.15
13	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	6,493,509,000	1,551,463,301	23.89
14	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	70,000,000	10,919,978	15.60
15	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)	16,800,000	1,253,000	7.46
16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Ambon (%)	10,000,000		-
17	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon (%)	10,000,000	1,799,400	17.99
18	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	20,000,000	1,985,500	9.93
19	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	20,000,000		-
Total		52,988,789,000	26,151,562,749	49.35

Sumber data : Aplikasi OmSpan Kemenkeu

3.4 Efisiensi Anggaran BPPP Ambon

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Penghitungan efisiensi anggaran dapat dilihat pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Dasar hukum terkait penghitungan efisiensi terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran.

Tabel 29. Nilai Efisiensi BPPP Ambon per masing-masing Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA	NILAI KINERJA	PAGU	REALISASI	% REALISASI	NILAI EFISIENSI
1	Jumlah Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Ambon (Orang)	120	13,200,000		-	120.00
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	115	2,030,057,000	32,340,000	1.59	113.41
3	Nilai PNBPN Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	120	465,384,000		-	120.00
4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	0	18,000,000		-	-
5	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	0	592,738,000	353,120,093	59.57	59.57
6	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Disuluh Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	110	592,738,000	353,110,093	59.57	50.43

NO	INDIKATOR KINERJA	NILAI KINERJA	PAGU	REALISASI	% REALISASI	NILAI EFISIENSI
7	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	100	592,739,000	333,120,000	56.20	43.80
8	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	120	111,793,000	20,010,094	17.90	102.10
9	Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi Yang Mendapatkan Pendampingan oleh Satminkal BPPP Ambon (Unit)	120	3,802,932,000	1,163,188,393	30.59	89.41
10	Media Penyuluhan Sesuai Dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Ambon	0	31,858,899,000	18,910,177,484	59.36	- 59.36
11	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan Yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Ambon (Orang)	0	70,000,000		-	-
12	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	103.34	6,200,000,000	3,419,075,413	55.15	48.19
13	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	115.56	6,493,509,000	1,551,463,301	23.89	91.67
14	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Ambon (%)	100	70,000,000	10,919,978	15.60	84.40
15	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)	0	16,800,000	1,253,000	7.46	- 7.46
16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Ambon (%)	0	10,000,000		-	-
17	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon (%)	120	10,000,000	1,799,400	17.99	102.01
18	Nilai IKPA BPPP Ambon (Nilai)	118.87	20,000,000	1,985,500	9.93	108.94
19	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	0	20,000,000		-	-
TOTAL		112.16	52,988,789,000	26,151,562,749	49.35	62.81

Sumber data : Aplikasi OmSpan Kemenkeu dan Aplikasi Kinerjaku KKP

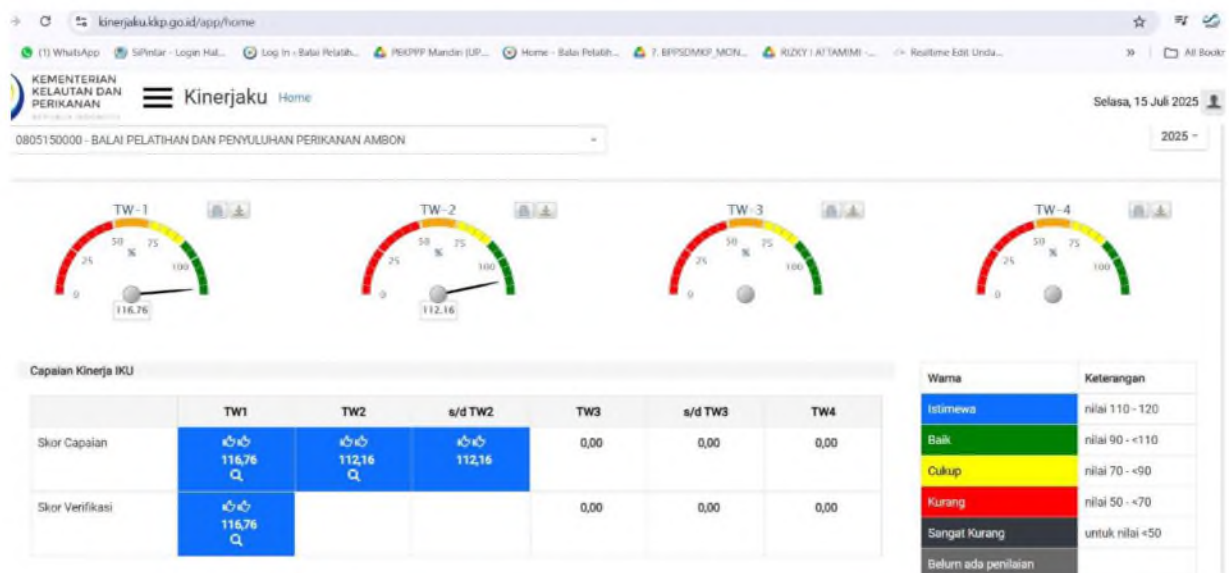
Efisiensi anggaran BPPP Ambon pada triwulan II Tahun 2025 memperoleh skor 62,81 dan hal ini dikarenakan karena seluruh IKU telah terealisasi dengan baik.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Capaian Kinerja Utama

Pada Triwulan II 2025, BPPP Ambon memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 6 Sasaran dan 19 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja BPPP Ambon tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indikator), disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis logical framework dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPP Ambon Triwulan II tahun 2025 sebesar 112,16 %, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 6. Dashboard Kinerjaku Level 3 BPPP Ambon

Selama Triwulan II tahun 2025, dari 9 IKU yang menjadi target Triwulan II

tahun 2025 BPPP Ambon, telah terealisasi sesuai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

Rincian target dan realiasi dari 19 IKU tersebut adalah:

Tabel 27. Capaian IKU BPPP Ambon tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1	REALISASI TW 1	% REALISASI
1	Terselenggaranya Pelatihan dan Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Dunia Kerja di BPPP Ambon (Orang)	30	48	120
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (Orang)	60	69	115
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,4	0,53	120
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (Orang)	0	0	-
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	5	Sarana pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Ambon (Unit)	0	0	-
3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Disuluh Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	1000	1100	110
		7	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	6	6	100
		8	Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Pendukung Yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	18	40	120
		9	Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi Yang Mendapatkan Pendampingan oleh Satminkal BPPP Ambon (Unit)	5	6	120
4	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	10	Media Penyuluhan Sesuai Dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Ambon	0	0	-
		11	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan Yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Ambon (Orang)	0	0	-

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW 1	REALISASI TW 1	% REALISASI
5	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Ambon	12	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	50	51,67	103,34
		13	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	70	80,89	115,56
		14	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP (%)	85	85	100
		15	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)	0	0	-
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Ambon (%)	80	0	0
		17	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP BPPP Ambon (%)	80	100	120
		18	Nilai IKPA BPPP Ambon (Nilai)	84	99,84	118,86
		19	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	0	0	-

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi rencana aksi triwulan II tahun 2025, IKU dengan Target Kinerja Tahunan yang diprediksi tidak tercapai target kinerjanya dikarenakan kurang termonitor setiap triwulannya. Maka dari itu Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders BPPP Ambon. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPP Ambon. Akhirnya, BPPP Ambon berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

LAMPIRAN





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abubakar**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ~~27~~ Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan



Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Ambon

Abubakar

LEMBAR PENGESAHAN		
NO	JABATAN	PARAF
1.	Katimja Serapan Lulusan dan Kemitraan	
2.		



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abubakar**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Januari 2025

Pihak Kedua



Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Ambon


Abubakar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Satker BPPP Ambon yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri atau Dunia Kerja (orang)	1.294
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Ambon (orang)	1.840
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Ambon (Rupiah Miliar)	0,81
		4	Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Ambon (orang)	30
2	Terselenggaranya Tata Kelola Pelatihan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	5	Sarana Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya di BPPP Ambon (unit)	1
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	6	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Ambon (%)	100
		7	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Ambon (indeks)	83
		8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPP Ambon (%)	85
		9	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Ambon (Nilai)	80
		10	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Ambon (%)	80
		11	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Ambon (%)	80
		12	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	92
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Ambon (Nilai)	71,5

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2.583.441.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	12.853.509.000
Total Anggaran BPPP Ambon		15.436.950.000

Jakarta, 27 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan
Kelautan dan Perikanan



Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Ambon

Abubakar



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAM www.kkp.go.id SUREL pusluhkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abubakar**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Yayan Hikmayani**
Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan

Yayan Hikmayani

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon



Abubakar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Disuluh Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	2.939
		2	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung Ditingkatkan Kelasnya Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	24
		3	Kelompok Pelaku Usaha/Pelaku Pendukung yang Dibentuk Oleh BPPP Ambon (Kelompok)	114
		4	Gabungan Kelompok/Koperasi/Korporasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Ambon (Unit)	19
2	Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	5	Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Ambon	1
3	Terselenggaranya Tata Kelola Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	6	Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Ambon (Orang)	7

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2.550.084.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	35.661.831.000
Total Anggaran BPPP Ambon		38.211.915.000

Jakarta, 30 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan

Yayan Hikmayani

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon


Abubakar

Pihak Kedua

Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan


Yayan Hikmayani

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon


Abubakar



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

JL. DR. J. LEIMENA, RUMAH TIGA, KEC. TLK. AMBON, KOTA AMBON, MALUKU KODE POS 97233

TELEPON (0911) 322710 (LACAK), FAKSIMILE (0911) 322711)

LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppp_ambon@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR B. 12/BPPP.AMB/OT.710/I/2025

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon, perlu membentuk tim teknis tata kelola kinerja di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, perlu memberi penugasan kepada Tim Teknis Tata Kelola Kinerja di Lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon;

3. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja BPPP Ambon Nomor : SP DIPA- 032.12.2.238755/2025, Jakarta, 02 Desember 2024.

Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2);

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114).

Memberi Tugas

Kepada : Daftar terlampir.

Untuk : 1. Sebagai tim teknis tata kelola kinerja BPPP Ambon Tahun 2024 (daftar penugasan terlampir);
2. Melaksanakan tugas mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Ambon, 2 Januari 2025
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon,



Lampiran Surat tugas

Nomor : B. 12/BPPP.AMB/OT.710/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

I. Daftar Tim Teknis Tata Kelola Kinerja BPPP Ambon Tahun Anggaran 2025 :

Penanggung Jawab				
No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan dalam penugasan
1.	Abubakar, S.St.Pi, M.Si	19780427 200312 1 001 Pembina IV/a	Kepala Balai	Pengarah
2.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Perencana Ahli Muda	Penanggung Jawab Tata Kelola Kinerja Manajerial
3.	Ekadasa Priantara, ST, M.Si	19710228 200212 1 002 Pembina IV/a	Instruktur Ahli Muda	Penanggung Jawab Tata Kelola Bidang Pelatihan
4.	A.R Sopaheluwakan, S.Pi, M.Si	19770605 200701 2 003 Pembina IV/a	Analisis Kepegawaian Muda	Penanggung Jawab Tata Kelola Bidang Penyuluhan
5.	Rachel L. Wattimena, S.Pi.,M.Si	19730531 200604 2 007 Penata Tk.I III/d	Instruktur Muda	Anggota
Tim Pelaksana Kesekretariatan				
No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan dalam penugasan
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Perencana Ahli Muda	Ketua
2.	Moh. Arief Hidayat, A.Md., S.Pi	19870216 201012 1 002 Penata Muda Tk.I III/b	Instruktur Pertama	Sekretaris
3.	Dessy Rompis, S.AP	19791222 200312 2 005 Penata Muda III/a	Pengelola Rencana Program dan Kegiatan	PelaksanaDukungan Manajerial/Manajer Kinerja
4.	Fiona A.B Nikyuluw, S.Pi, M.Si	19750205 200212 2 004 Pembina IV/a	Instruktur Madya	PelaksanaDukungan Manajerial/Manajer Kinerja
5.	La Tati	19680423 199203 1 001 Penata Muda Tk.I / IIIb	Pengadm. Persuratan	Pelaksana Sarpras dan PNB/Manajer Kinerja
6.	Polly S.B Christian, S.St.Pi,M.Si	19770608 200312 1 004 Penata Tk.I III/d	Instruktur Muda	Pelaksana Pelatihan /Manajer Kinerja
7.	Aulia Rahman Rajikin Kibas, S.Sat	-	Pengemudi	PelaksanaDukungan Manajerial/Manajer Kinerja
Sub-Tim Perencanaan Kinerja				
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Perencana Ahli Muda	Koordinator

Penanggung Jawab				
No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan dalam penugasan
2.	Ekadasa Priantara, ST, M.Si	19710228 200212 1 002 Pembina IV/a	Instruktur Ahli Muda	Anggota
3.	A.R Sopaheluwakan, S.Pi, M.Si	19770605 200701 2 003 Pembina IV/a	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota
Sub-Tim Pengukuran dan Pelaporan Kinerja				
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Perencana Ahli Muda	Koordinator
2.	Moh. Arief Hidayat, A.Md., S.Pi	19870216 201012 1 002 Penata Muda Tk.I III/b	Instruktur Pertama	Anggota
3.	Dessy Rompis, S.AP	19791222 200312 2 005 Penata Muda III/a	Pengelola Rencana Program dan Kegiatan	Anggota
4.	Fiona A.B Nikyuluw, S.Pi, M.Si	19750205 200212 2 004 Pembina IV/a	Instruktur Madya	Anggota
5.	Aulia Rahman Rajikin Kibas, S.Sat	-	Pengemudi	Anggota
Sub-Tim Evaluasi Kinerja				
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Perencana Ahli Muda	Koordinator
2.	Moh. Arief Hidayat, A.Md., S.Pi	19870216 201012 1 002 Penata Muda Tk.I III/b	Instruktur Pertama	Anggota
3.	Dessy Rompis, S.AP	19791222 200312 2 005 Penata Muda III/a	Pengelola Rencana Program dan Kegiatan	Anggota
4.	Fiona A.B Nikyuluw, S.Pi, M.Si	19750205 200212 2 004 Pembina IV/a	Instruktur Madya	Anggota
5.	Rachel L. Wattimena, S.Pi, M.Si	19730531 200604 2 007 Penata Tk.I III/d	Instruktur Muda	Anggota
6.	Johanna L. Thenu, S. Pi, MP	19770415 200502 2 001 Penata Tk.I III/d	WI Muda	Anggota
Sub-Tim Verifikasi Kinerja				
1.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Perencana Ahli Muda	Koordinator
2.	Moh. Arief Hidayat, A.Md., S.Pi	19870216 201012 1 002 Penata Muda Tk.I III/b	Instruktur Pertama	Anggota
3.	Murni Samin, S.Sos	19771020 200604 2 009 Penata Muda III/a	Pengelola Kepegawaian	Anggota
4.	Rizky Irawan Attamimi, S.Kom	-	Tenaga Teknis	Anggota
5.	Soraya, S.Pi	-		Anggota

II. Daftar Penugasan Tim Teknis Tata Kelola Kinerja BPPP Ambon Tahun Anggaran 2025 :

No.	Jabatan dalam penugasan	Detail tugas
1	2	3
1.	Pengarah	Memberikan arahan dan bimbingan kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis dalam rangka pelaksanaan tata kelola kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon.
2.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap tata kelola kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon.
3.	Pelaksana	🚩 Ketua: Melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon. 🚩 Sekretaris: Memberikan dukungan teknis dan administrative kepada Tim Teknis Tata Kelola Kinerja BPPP Ambon. 🚩 Manajer Kinerja: Mengkoordinasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja di lingkungan unit kerja yang bersangkutan untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan 🚩 Koordinator Sub-Tim: Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kegiatan Sub-Tim serta melaporkan hasil kepada Ketua Tim Pelaksana Kesekretariatan
4.	Sub-Tim	🚩 Sub-Tim Perencanaan Kinerja 1) Memastikan bahwa a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) / Rencana Kerja telah tersusun memuat : 1. Visi, Misi, dan Program; 2. Tujuan yang berorientasi hasil, indicator kinerja tujuan, dan target; 3. Sasaran yang berorientasi hasil, indicator kinerja sasaran, dan target tahunan; serta Indikator Kinerja Utama (IKU). b. Indikator Kinerja :

No.	Jabatan dalam penugasan	Detail tugas
		1. Digunakan sebagai ukuran kinerja secara formal, baik indicator kinerja level III; 2. Indikator Kinerja eselon III telah selaras dengan IKU; 3. Indikator Kinerja memenuhi kriteria SMART-C; dan 4. Ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit organisasi. c. Dokumen kontrak kinerja memuat : 1. Perjanjian Kinerja (PK): i. Tersusun dan selaras dengan dokumen Renstra dan PK atasannya; ii. Memuat target kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan; dan iii. Dilengkapi dengan matrik cascading untuk pedoman penyusunan PK level dibawahnya. 2. Peta strategi; 3. Rincian target IKU secara bulanan / triwulanan / semesteran / tahunan yang memuat metode perhitungan masing-masing IKU; 4. Matriks cascading kinerja organisasi level III 5. Pohon kinerja level III 6. Inisiatif strategi/rencana aksi atas PK. 2) Memastikan bahwa rencana aksi atas kinerja telah tersusun dan dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan; 3) Memastikan seluruh sasaran strategi, indikator kinerja, target, dan rencana aksi diinput kedalam system aplikasi pengelolaan kinerja; dan 4) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing 🚩 Sub-Tim Pengukuran Kinerja 1) Menyusun pedoman / mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja; 2) Melaksanakan pengukuran capaian IKU dan rencana aksi secara berjenjang dan berkala (bulanan/triwulan/semesteran/tahunan);

No.	Jabatan dalam penugasan	Detail tugas
		3) Memastikan seluruh hasil pengukuran capaian IKU dan rencana aksi diinput kedalam system aplikasi pengelolaan kinerja; dan 4) Mengkoordinasikan proses pengukuran kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing. ✚ Sub-Tim Pelaporan Kinerja 1) Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LCK) dan Laporan Kinerja (LKj) secara berkala (bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan). 2) Memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku; 3) Memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan; 4) Memastikan LKj yang disusun disampaikan tepat waktu dan di unggah ke dalam website resmi; dan 5) Mengkoordinasikan proses pelaporan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing. ✚ Sub-Tim Evaluasi Kinerja 1) Melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja; 2) Menyusun laporan hasil evaluasi program yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan, pengendalian, dan peningkatan kinerja selanjutnya; 3) Melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan pada unit kerja di masing-masing sesuai ketentuan; 4) Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan; dan 5) Mengkoordinasikan proses evaluasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing. ✚ Sub-Tim Verifikasi Kinerja 1) Melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil perencanaan kinerja; 2) Melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil pengukuran kinerja; 3) Melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil pelaporan kinerja;

No.	Jabatan dalam penugasan	Detail tugas
		4) Memastikan seluruh softcopy data, informasi, dan dokumen hasil perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan disampaikan pada sistem dokumentasi online; dan 5) Mengkoordinasikan proses verifikasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing.

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon,



Abubakar



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON

JL. DR. J. LEIMENA, RUMAH TIGA, KEC. TLK. AMBON, KOTA AMBON, MALUKU KODE POS 97233

TELEPON (0911) 322710 (LACAK), FAKSIMILE (0911) 322711)

LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppp_ambon@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR B. 13/BPPP.AMB/OT.710/I/2025

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pelaksanaan anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon Tahun 2025 dipandang perlu menunjuk Tim Tata Kelola SAKIP di BPPP Ambon;

2. Bahwa Pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat tugas ini dianggap mampu memenuhi syarat untuk diberi tugas sebagai Tim Tata Kelola SAKIP pada BPPP Ambon;

3. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja BPPP Ambon Nomor : SP DIPA- 032.12.2.238755/2025, Jakarta, 02 Desember 2024.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan REformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan att a cara review atas laporan kinerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan kerja dan Anggaran Kementerian negara/Lembaga;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 87/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.

Memberi Tugas

Kepada : Daftar nama terlampir.

Untuk : 1. Sebagai Tim Tata Kelola SAKIP Tahun 2025 BPPP Ambon;
2. Melaksanakan tugas mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Ambon, 2 Januari 2025
Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon,



Lampiran Surat tugas

Nomor : B. 13/BPPP.AMB/OT.710/I/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Daftar Nama Tim Tata Kelola SAKIP Tahun 2025:

No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan dalam penugasan
1	2	3	4	5
1.	Abubakar, S.St.Pi, M.Si	19780427 200312 1 001 Pembina Tk.I IV/b	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Rahmawati Umasugi, S.Pi, M.Si	19771101 200312 2 004 Pembina IV/a	Plt. Kasubag Umum	Ketua
3.	Dessy Rompis, S.AP	19791222 200312 2 005 Penata Muda III/a	Pengelola Rencana Program dan Kegiatan	Sekretaris
4.	Moh. Arief Hidayat, A.Md.,S,Pi	19870216 201012 1 002 Penata Muda Tk.I III/b	Instruktur Pertama	Anggota
5.	Fiona A.B Nikyuluw, S.Pi, M.Si	19750205 200212 2 004 Pembina IV/a	Instruktur Madya	Anggota
6.	Aulia Rahman Rajikin Kibas, S.Sat	-	Pengemudi	Anggota

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Ambon,

